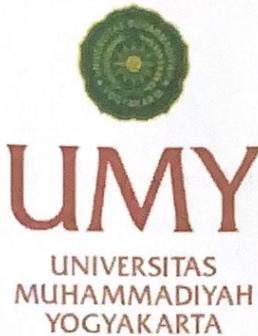


**KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH TERHADAP MUTASI
APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PEMBERLAKUAN SURAT
EDARAN KEMENDAGRI NOMOR 821/5292/SJ TAHUN 2022**

Skripsi



Lengkap & Islami

Disusun Oleh:

Zulkifli Andrian

NIM. 20190610134

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulkifli Andrian

NIM : 20190610134

Judul Skripsi : **KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH TERHADAP MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN KEMENDAGRI NOMOR 821/5292/SJ TAHUN 2022**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

UMY
UNIVERSITAS
YOGYAKARTA

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 03 Maret 2023



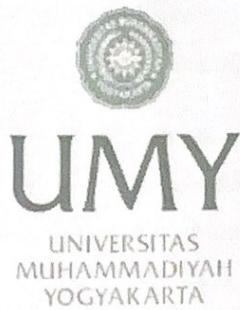
Zulkifli Andrian
NIM. 20190610134

HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT.
2. Orang tua.
3. Kakak dan adik.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH TERHADAP MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN KEMENDAGRI NOMOR 821/5292/SJ TAHUN 2022**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam menulis skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., M.Cl., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Ibu Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pemahaman dan pengetahuan serta wawasan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan lancar.
5. Ibu dan Ayah tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dengan selalu mendukung sepenuhnya atas pilihan yang saya putuskan.

6. Saudara-saudariku tercinta Andry Ferdiansyah dan Syahrul Gunawan yang selalu memberikan motivasi beserta dorongan untuk melanjutkan pendidikan, dan juga adek saya Inaya Syakila Athifa yang sangat saya cintai sebagai motivasi untuk menjadi orang yang lebih berguna.
7. Bapak Dr. Ahmad Sahide, S.I.P., M.A dan sepupu saya Rezki Amalia sebagai keluarga yang telah membersamai saya di perantauan.
8. Seluruh Dosen, staf, dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Senior saya Tza Rizal Pahlawan, Syair Afdillah, Rakha Ramadhan, Hairil Amri, Alaya Roo, Iham, Fadel Oswisa Putra, Sandi A Pristantyo dan seluruh senior yang tidak dapat saya tuliskan. Terima kasih atas bantuan dan kontribusi pengetahuan selama menyelesaikan studi perkuliahan.
10. Teman seperjuangan Ucay, Ikrar, Alyian, Uccang, Jek, Firman, Ghofar, Agung, Hana, Luklung dan seluruh teman yang tidak sempat saya sebutkan, terima kasih atas dukungan yang diberikan.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Sulawesi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih atas tempat berkumpul sebagai keluarga di tanah perantauan beserta pengetahuan dan pengalaman selama hidup diperantauan.
12. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih sebagai wadah untuk menggali pengetahuan dan berbagai wawasan.
13. Kepada yang bernim 20190610042, yang selalu memberi motivasi dalam melangkah dan meluangkan waktunya serta kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya.

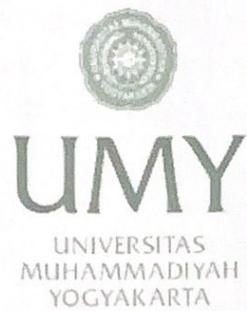
Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Maret 2023



Zulkifli Andrian
NIM. 20190610134



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Pemerintah Daerah	10
2. Aparatur Sipil Negara (ASN)	12
3. Pengertian Peraturan Perundang-undangan.....	14
BAB III	19
METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Jenis Data dan Bahan Hukum	19
C. Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Analisis Data	22
BAB IV	23
PEMBAHASAN	23
A. Penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah	23
1. Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah	23
2. Pertanggung Jawaban Penjabat Kepala Daerah	33
3. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Terhadap Mutasi Aparatur Sipil Negara	38
B. Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia	44
1. Kedudukan Surat Edaran dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	44
2. Judicial Review Surat Edaran	54

3.	Analisis Surat Edaran Kemendagri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.....	73
BAB V	103
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	104

